



JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN

ISSN : 2302 - 9595
Volume 4 No 3 November 2015

JEP

Persepsi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Kabupaten
Mesuji (Studi Kasus Kecamatan Tanjungraya)
Agung Wihandoko

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran
Pemerintah Terhadap Perkembangan Ekonomi Provinsi Lampung
Tahun 2000-2013
Tria Dessi Putri, Toto Gunarto

Menabung Dinar : Antisipasi Inflasi dan Depresiasi Ongkos Naik Haji
Firmansyah

Desentralisasi Fiskal, Tinjauan Teoritis Dan Empiris
Marselina

Analisa Determinan Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim Perkotaan
In Islamic Perspectives
Aas Nurasyiah

Analisis Kausalitas Granger Antara Pertumbuhan Ekonomi,
Pengeluaran Pemerintah Dan Inflasi Di Provinsi Lampung
Dedy Yuliawan. Devi Evtasari



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNILA**

Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila
Jl. Soemantri Brojonegoro No 1 Gedongmeneng
Bandar Lampung 35145

JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.Sc. (Rektor Universitas Lampung)
Pembina	: Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.Sc. (Pembantu Rektor I Unila) : Dr. Eng. Admi Syarif (Ketua Lembaga Penelitian Unila) : Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. (Dekan FEB Unila)
Pemimpin Umum	: Muhammad Husaini, S.E., M.Si. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Unila
Dewan Editor	
Ketua	: Prof. S.S.P. Pandjaitan, S.E., M.Sc. Ph.D
Anggota	Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si. Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si. Johannis Damiri, S.E., M.Sc. Ph.D Dr. Yoke Muelgini, M.Si. Dr. Saimul, S.E., M.Si. Dr. Syahfirin Abdullah, S.E., M.Si Yourni Atmadja, S.E., M.Si. Muhidin Sirat, S.E., M.Si. Moneyzar Usman, S.E., M.Si.
Redaksi Pelaksana	
Ketua	: Deddy Yuliawan, S.E., M.Si.
Wakil Ketua	: Asih Murwiati, S.E., M.E.
Sekretaris	: Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si.
Bendahara	: Tiara Nirmala, S.E., M.Sc.
Tata Usaha dan Kearsipan	: Sahidin, S.E.
Distribusi dan Sirkulasi	: Doni Oktavianto
Alamat Redaksi	: Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng – Bandar Lampung 35145
Telp.	: (0721) 704622
Email	: jep_feb_unila@unila.ac.id , jep_feb_unila@gmail.com
Website	: fe.unila.ac.id

Jurnal Ekonomi Pembangunan merupakan media komunikasi ilmiah, diterbitkan tiga kali setahun oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, berisikan ringkasan hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi.

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga terbitan volume 4 nomor 3 Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) ini dapat diselesaikan. Sekali lagi kami berharap, dengan terbitan Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) ini kiranya dapat memfasilitasi dosen dan alumni jurusan Ekonomi Pembangunan baik dari Strata-1, Strata-2 maupun prpgram Doktor dalam menuangkan ide-ide keilmuan kedalam bentuk tulisan ilmiah.

Ucapan terima kasih tak hentinya kami sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) terutama kepada dosen dilingkungan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila yang terus membantu dalam proses penerbitan dan perbaikan jurnal ini.

Terbitan kali ini merupakan terbitan ketiga volume 4 pada tahun 2015. Dalam rangka meningkatkan status jurnal ini (akreditasi) kami mengharapkan sumbang saran semua pihak untuk kemajuan dan kelangsungan jurnal ini. Dan akhirnya kami berharap agar jurnal ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, November 2015
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila
Kajur



Muhammad Husaini, S.E., M.Si
NIP 19601220 198903 1 004

Desentralisasi Fiskal, Tinjauan Teoritis Dan Empiris**Marselina****Dosen FEB Universitas Lampung**ikbal_tawakal@yahoo.com**Abstrak**

Desentralisasi fiskal berarti perubahan atau pergeseran kekuatan dalam pengambilan keputusan bidang keuangan dari pusat ke daerah. Dengan mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih baik dan lebih tepat, pertanggungjawaban makin baik dan rakyat rela berkontribusi dalam pembangunan sehingga dan pembangunan benar tercipta dari bawah (pembangunan inklusif). Pengalaman di beberapa Negara menunjukkan model atau design desentralisasi fiskal yang dipilih telah membawa dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, namun di beberapa Negara lainnya desentralisasi fiskal berdampak sebaliknya, menimbulkan raja raja kecil di daerah, *tax effort* yang rendah, munculnya fenomena *fly paper effect*, hingga maraknya kasus korupsi. Lalu bagaimana model desentralisasi fiskal yang dipilih Indonesia, dapatkah desentralisasi fiskal mewujudkan stabilitas makroekonomi Indonesia melalui pengurangan pengangguran dan menjaga inflasi, serta mengurangi keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Beberapa pertanyaan di atas memotivasi penulis untuk mengkaji lebih lanjut baik sisi teoritis maupun empiris desentralisasi fiskal ini.

Key words: Desentralisasi fiskal, intergovernmental fiscal, Tax Effort, DAU

Latar Belakang

Desentralisasi berarti perubahan atau pergeseran kekuatan dalam pengambilan keputusan dari pusat ke daerah, baik di bidang politik, administrasi, fiskal, ekonomi dan posisi vertikal. Desentralisasi juga dapat dipandang sebagai alat atau kendaraan untuk mencapai tujuan bernegara. Dengan mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih, pertanggungjawaban makin baik dan rakyat rela berkontribusi dalam pembangunan sehingga dan pembangunan benar tercipta dari bawah (pembangunan inklusif).

Untuk menggerakkan desentralisasi, ada 4 roda utamanya, yaitu (a) desentralisasi politik; (b) desentralisasi administratif; (c) desentralisasi fiskal; dan (d) desentralisasi ekonomi. Banyak negara saat ini mulai meninggalkan sistem sentralistik menuju sistem desentralistik ini. Namun pertanyaannya adalah apakah kebijakan desentralisasi akan bernilai positif atau sebaliknya terhadap kesejahteraan masyarakat? Akankah desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah, akan mengurangi kemiskinan, mempercepat pencapaian *Millennium Development Goals*, memajukan pelayanan masyarakat (*public services*). Dapatkah desentralisasi fiskal mewujudkan stabilitas makroekonomi melalui pengurangan pengangguran dan menjaga inflasi, serta mengurangi keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Beberapa pertanyaan di atas merupakan tujuan desentralisasi fiskal yang bisa tercapai bisa juga gagal. Sehingga penting di dalam tulisan ini untuk mengkaji lebih lanjut baik sisi teoritis maupun empiris.

Teori Dasar Desentralisasi Fiskal

Pengertian Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi secara harafiah berarti penyerahan wewenang dari satu yang lebih atas (pusat) ke level di bawahnya atau pemerintahan di bawahnya. Beberapa jenis desentralisasi tergantung pada fungsi apa yang diserahkan pemerintah atasnya (pusat) ke daerah. Jika yang diserahkan berupa pengelolaan keuangan daerah disebut desentralisasi fiskal. Jika yang diserahkan dalam bentuk pembagian kewenangan disebut desentralisasi administrasi. Sebaliknya

jika yang diserahkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah langsung disebut desentralisasi politik dan jika yang diserahkan pusat adalah pemberian kewenangan dalam menentukan inisiatif strategi dan kebijakan ekonomi local itu adalah desentralisasi ekonomi.

Desentralisasi fiskal menurut Oates (1972) adalah kondisi dimana ada keinginan dan kebutuhan agar pelayanan bisa diberikan oleh pemerintah lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah local akan lebih fleksible dan lebih dekat mengadopsi keinginan rakyatnya. Sementara Hayek (1945) menjelaskan desentralisasi dianggap sebagai *Market Preserving Federalism* dimana desentralisasi sebagai suatu mekanisme kontrol terhadap perluasan sektor publik dan mendukung supaya pasar menjadi efektif (Weingast 1995, McKinnon 1997. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sementara menurut Bank Dunia mendefinisikan desentralisasi sebagai penugasan dan responsibilitas dari aspek keuangan, politik dan administrasi yang diberikan kepada tingkatan-tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka konsep desentralisasi fiskal sangat berhubungan dengan transfer kekuasaan dan kewenangan dari level pemerintahan yang tinggi kepada yang lebih rendah dalam suatu sistem pemerintahan. Ukuran desentralisasi fiskal diproksikan antara lain dengan desentralisasi pengeluaran, desentralisasi pendapatan, otonomi fiskal, fiskal akuntabilitas, desentralisasi pegawai dan jumlah PNS di daerah.

Tujuan Desentralisasi Fiskal

Menurut Sivagnanam (2007) terdapat tiga tujuan desentralisasi fiskal yaitu agar alokasi sumber daya manusia lebih adil, terciptanya stabilisasi ekonomi dan redistribusi pendapatan di tengah masyarakat. Alasan paling umum dilakukannya desentralisasi adalah kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik karena kegagalan pemerintah pusat untuk menyediakan layanan lokal yang efisien dan efektif. Desentralisasi fiskal akan membawa pemerintah lebih dekat dengan warganya dan dengan demikian akan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Dethier, 1999). Tujuan desentralisasi fiskal lainnya daerah diharapkan dapat

menumbuhkan kemandirian dalam mengurus daerahnya sendiri, menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dalam konteks kebijakan ekonomi makro, memperkecil ketimpangan antara keuangan pusat dan daerah (*Vertical Imbalance*) melalui pemberian kewenangan *Taxing Power*. Juga untuk memperkecil *Horizontal Imbalance* (ketimpangan kemampuan keuangan antara daerah), meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Faktor-Faktor Yang Mendorong Keinginann Negara Untuk Melakukan Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal muncul sebagai proses reformasi administrasi keuangan di suatu negara dimana sebagian fungsi administrasi keuangan dipindahkan dan didistribusikan kepada pemerintah di bawahnya (daerah). Desentralisasi fiskal sebagai bentuk reformasi institusi juga sebagai suatu strategi pembangunan untuk mencapai tiga dasar fungsi pemerintah, yaitu mengalokasikan sumber daya, re-distribusi dan stabilitas ekonomi makro. Beberapa alasan sekelompok masyarakat pindah ke sistem desentralisasi ini, yaitu masyarakat tidak puas dengan sistem perencanaan terpusat (*top down*) selama ini sehingga tercipta iklim demokratis. Alasan lain karena negara ingin mencegah konflik antar etnis atau sapatisme. Alasan lainnya karena masyarakat ingin lebih memunculkan budaya lokal dan otonomi politik. Bagi pemerintah latar belakang diambilnya kebijakan desentralisasi fiskal agar tercipta stabilitas makro dan keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*). Keberlanjutan fiskal pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Untuk negara-negara berkembang seperti di Amerika Latin desentralisasi fiskal dipandang sebagai bagian proses pendalaman dalam demokratisasi, sedangkan di negara-negara Asia, desentralisasi fiskal datang dari kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dana Desentralisasi Fiskal dan Sifatnya

Agar keputusan desentralisasi fiskal berjalan baik, beberapa tugas dan fungsi pusat yang telah digeserkan ke daerah secara tegas harus diikuti dengan pelimpahan beberapa jenis transfer pusat ke daerah. Dana transfer pusat ini diharapkan daerah dapat menjalankan fungsi dan peran barunya itu. Dana desentralisasi fiskal yang utama adalah *intergovernmental fiscal* (I-gFT) atau dikenal dengan hibah (*grant*). I-gFT atau hibah digulirkan ke daerah untuk menciptakan suatu sistem insentive dan sistem mekanisme akuntabilitas

keuangan daerah sehingga muncul. Daerah diharapkan dapat memperbaiki manajemen keuangan daerah dengan mengimplementasikan prinsip *Value of Money* yaitu efisiensi, efektif, ekonomis dan melaksanakan prinsip *Good Governance* antara lain transparansi, akuntabel dan *fairness*. Dengan menjalankan 2 prinsip ini diharapkan muncul perilaku disiplin fiskal atau *local fiscal behavior* dan sebagai bentuk akuntabilitas atau tanggung jawab dari penerima hibah kepada pemerintah dan masyarakat. Mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berarti pemerintah daerah berusaha bertanggung jawab atas setiap rupiah uang masyarakat yang dikelolanya. Bagaimana peran dana hibah ini ? Berdasarkan pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa peran dana transfer atau *intergovernmental fiscal transfers* dalam perekonomian daerah adalah 60 persen dari total penerimaan daerah di Negara-negara sedang berkembang, sedangkan di negara OECD peran I-gFT sebesar 29 persen, sementara di negara-negara *Non-Nordic Eropa* sebesar 46 persen di Negara. Di Indonesia dana hibah ini sebesar 45-60-persen.

Secara umum terdapat 2 sifat *intergovernmental finance transfer* yaitu (1) Hibah Tidak Bersyarat atau *Un-Conditional Grant* atau *Grant for General-Purpose* dan (2) Hibah Bersyarat atau *Conditional Grant* atau *Grant with Specific-Purpose* atau *Earmarked Transfers*. *Un-Conditional Grant* sudah menjadi mandat hukum atau *discretionary nature* seperti akibat adanya otonomi daerah. Penerimaan hibah dapat bebas menggunakannya sepanjang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Barati and Szalai (2000) dipertegas bahwa "*General-purpose transfers are termed bloc transfers when they are use to provide broad support in a general area of subnational expenditures (such as education) while allowing recipients discretion in allocating the funds among specific uses. Bloc grants are a vaguely defined concept*". Sementara hibah bersyarat atau *conditional grant* atau *conditional transfers* yaitu dana transfer pusat yang diberikan ke daerah untuk memberikan incentives bagi pemerintah daerah melalui program tertentu yang sudah ditentukan pusat. *Grants* ini merupakan hibah yang *regular or mandatory* in nature, *discretionary* atau *ad hoc*. *Conditional transfers* ini mensyaratkan dana pendamping dari pemerintah daerah. Selain 2 kategori di atas terdapat kategori lain dari dana transfer pusat yaitu *Nonmatching Transfers* dan *Matching*

Transfers. Non Matching Transfer yaitu "Conditional non matching transfers provide a given level of funds without local matching, as long the funds are spent for a particular purpose" dan Matching Transfers yaitu " Conditional matching grants, or cost-sharing programs, require that funds be spent for specific purposes and that the recipient match the funds to some degree.

Latar Belakang Tuntutan Desentralisasi Fiskal dan Posisi Desentralisasi Fiskal yang Dipilih

Latar Belakang Tuntutan Desentralisasi Fiskal

Latar belakang beberapa negara memutuskan untuk meninggalkan sistem sentralistik menuju sistem desentralistik berbeda-beda. Pengalaman di Nigeria sebagai salah satu negara miskin menunjukkan bahwa tuntutan desentralisasi fiskal karena negara ini sering dihadapkan pada tingginya persaingan antar pemerintah daerah yang menjurus pada ketimpangan antar wilayah. Tingginya tingkat persaingan antar wilayah akibat kemiskinan yang makin meluas, lemahnya kontrol pusat serta dominasi kelompok etnis yang menuntut lebih banyak. Kemiskinan yang begitu meluas di negara ini akibat marjinalisasi, penindasan dan pengabaian oleh pemerintah. Ditambahkan oleh Ijaya (1998) bahwa kemiskinan di negara ini lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM serta ketidakdisiplinan fiskal, sementara menurut Aigbokhan (2000) kemiskinan akibat kesalahan kebijakan dalam negeri. Lebih lanjut Thomas dan Canagarajah (2002) menemukan bahwa dalam negeri kemiskinan di negara ini akibat kebijakan sosial ekonomi yang tidak mendukung persatuan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya.

Posisi Desentralisasi Fiskal yang Dipilih Beberapa Negara

Posisi desentralisasi fiskal yang dipilih atau yang akan dituju berbeda-beda antar Negara. Amerika Serikat lebih memilih desentralisasi fiskal melalui penyerahan sepenuhnya pengelolaan keuangan daerah ke 51 negara bagian masing-masing. Pemerintah pusat masih menyumbang sekitar dua pertiga dari pengeluaran total pemerintah. Sebaliknya di Austria, fungsi perumahan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara ekspansi ekonomi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berikut ini disajikan pilihan desentralisasi fiskal yang dipilih beberapa negara di dunia.

Tabel. 1 Posisi Desentralisasi Fiskal Yang Dipilih Beberapa Negara di Dunia

Negara	Posisi Desentralisasi Fiskal Yang Dipilih
Amerika	Pemerintah pusat masih menyumbang sekitar dua pertiga dari pengeluaran total pemerintah
Austria	Fungsi perumahan diserahkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lebih terlibat dalam kegiatan ekspansi ekonomi
Korea Selatan	Pelayanan publik yang menjadi kewenangan pusat adalah menyusun rencana pembangunan nasional, pengelolaan hutan nasional, pengelolaan sungai nasional, jalan raya, pelabuhan, tol, jalan negara, dan hingga pengelolaan taman nasional. Pemerintah pusat juga berwenang dalam penyusunan standar tenaga kerja dan standar survei
Kanada	Fungsi pelayanan publik telah bergeser dari pusat ke pemerintah daerah sehingga belanja pemerintah daerah lebih besar dibandingkan belanja pusat . Di Kanada tugas wewenang yang dialihkan antara lain kewenangan i lalu lintas jalan raya, pelatihan pasar tenaga kerja, kehutanan, pertambangan, dan bahkan administrasi Pengadilan Pidana
Denmark	Di Denmark . pengalihan kewenangan ke daerah antara lain perencanaan daerah, pelayanan kesehatan dasar, sekolah menengah, kualitas lingkungan, dan transportasi masyarakat
Perancis	Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah dalam hal: pendidikan, langkah-langkah dukungan ekonomi, dan transportasi lokal. Sebagian tanggung jawab utama masih disimpan tegas di tangan pemerintah pusat
Inggris	Beberapa fungsi signifikan didelegasikan kepada daerah, dan terdapat sentralisasi kekuasaan dalam hal pengaturan arah nasional, standar dan kerangka kebijakan
Argentina	Sistem federal, pembagian fungsi antara tingkat pemerintah relatif tidak ditentukan dalam konstitusi Pemerintah pusat menangani masalah keamanan sosial sedangkan pemerintah daerah menangani sebagian besar pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan
Brazil	Fungsi perumahan diserahkan dari pemerintah pusat tidak memiliki kejelasan distribusi fungsi pemerintahan pada aspek pelayanan publik (Kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, sanitasi, perumahan, dll) yang nantinya mengarah ke duplikasi tugas belanja
Peru	Memiliki kecenderungan yang sangat kuat ke arah sentralisasi Pemerintah daerah tidak diberi kekuasaan Sumber pendapatan daerah hanya pajak property/rumah, sedangkan pajak besar seperti pajak penghasilan, pajak penjualan dan konsumsi dipungut oleh pemerintah pusat
Indonesia	Sekitar 28% dari total pengeluaran nasional ditransfer ke daerah Pengeluaran untuk desentralisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1989 nilainya hanya 17% dan kemudian naik 28% pada tahun 2001 . Pada sisi pendapatan sumber pendapatan masih relatif terpusat. Kebijakan baru tentang desentralisasi dilaksanakan oleh Indonesia pada tahun 2000 dapat meningkatkan sub pendapatan nasional, yang merupakan bagian dari pendapatan nasional. Di tingkat provinsi, nilainya meningkat dari hanya 8% pada tahun 1994 menjadi 25% pada tahun 2001. Hal ini terjadi karena adanya perjanjian baru, yaitu pemerintah pusat harus mendistribusikan sebagian besar dari pendapatan untuk pemerintah provinsi dan pemerintah daerah

Dampak Desentralisasi Fiskal

Pengaruh Positif Desentralisasi Fiskal Secara Empiris

Dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan hal yang positif. Penelitian di Bolivia menunjukkan kinerja bidang pendidikan dan sektor publik lainnya seperti kesehatan meningkat signifikan setelah diterapkan desentralisasi fiskal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Simatupang (2009) bahwa kinerja sektor pendidikan meningkat melalui proksi tingkat perempuan yang bisa membaca (*female literacy rates*), lama bersekolah (*years of schooling*), tingkat putus sekolah (*drop out*) di tingkat SD dan SMP. Demikian juga penelitian yang dilakukan Faguet and Sánchez (2006) menemukan bahwa di Colombia implementasi desentralisasi fiskal mampu meningkatkan jumlah anak pendaftar masuk sekolah. Barankay and Lockwood (2007) juga menyatakan bahwa tingkat desentralisasi fiskal mempunyai hubungan positif dengan kesejahteraan masyarakat. Di Argentina, Habibi et al. (2003), Robalino, Picazo, and Voetberg (2001) menemukan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap penurunan angka kematian. Dengan menggunakan tingkat desentralisasi fiskal dengan proksi *share public expenditure* (pengeluaran publik dalam APBD). Khaleghian (2003) menemukan desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kinerja sektor kesehatan pada negara yang berpendapatan menengah dan tinggi. Robalino, Picazo, and Voetberg (2001) menemukan bahwa desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengeluaran sektor kesehatan. Porto Alegre, Brazil, Santos (2005) menemukan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan akses masyarakat yang lebih luas pada air minum dan sewage services. Wade (1998) menemukan telah terjadi peningkatan pada efisiensi sistem irigasi di Korea setelah diimplementasikan desentralisasi fiskal. Sementara Bank Dunia (1994) menemukan ketika desentralisasi fiskal diterapkan, kualitas dan kuantitas infrastruktur di daerah menjadi lebih baik. Leagher (2001) and Azfar and Livingston (2002) menemukan bahwa di Pilipina dan Uganda proses perencanaan anggaran daerah lebih *match* dengan dengan kebutuhan atau prioritas daerah sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal. Feld et al. (2004) mencatat di Swiss makin besar otonomi fiskal makin tinggi pertumbuhan ekonomi tercapai. Arze del Granado, Martínez-Vázquez, and

McNab 2005; Shelton 2007 dengan menggunakan panel data menemukan di Negara-negara sedang berkembang desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan *share* pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan terhadap APBD sehingga berdampak pada peningkatan kinerja di sector pendidikan dan kesehatan. Faguet (2004) juga menemukan desentralisasi fiskal mampu meningkatkan investasi di bidang pendidikan, pembangunan pedesaan, pengadaan air dan sanitasi serta derajat kesehatan. Brennan and Buchanan (1980), dan Niskanen (1975) menyatakan bahwa implementasi desentralisasi fiska l mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui inovasi dan persaingan dalam perolehan pajak dan upaya pajak (*tax competition and tax effort*). Terkait dengan tingkat korupsi di daerah, Weingast (1995) dan Arian (2004) menemukan desentralisasi fiks al akan mengurangi tingkat korupsi di daerah karena pengelolaan keuangan menjadi lebih akuntabel dan persaingan antar pemerintah daerah makin tinggi. Hal ini sebagai akibat mekanisme kontrol ada di tingkat lokal . Selain itu, informasi keuangan disediakan secara luas sebagai perwujudan pengelolaan keuangan yang lebih transparan. Hasil penelitian ini dilakukan oleh Seabright (1996), Boadway and Shah (2009) dan Ahlin(2000).

Pengaruh Positif Desentralisasi Fiskal Secara Teoritis

Di bawah ini disajikan dampak positif desentralisasi fiskal secara teoritis. Implimentasi desentralisasi fiskal mampu meningkatkan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang relatif lebih maju dibandingkan masa lalu. Daerah akan memiliki sumber dana yang relatif memadai untuk membuat masyarakat lebih sejahtera. Desentralisasi fiskal memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru; mendorong inovasi sehingga produksi meningkat, memunculkan kebanggaan kedaerahan; terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan pekerjaan, fasilitas umum dsb, terbangunnya secara bertahap sumberdaya manusia Daerah yang berkualitas

Dampak Negative Desentralisasi Fiskal Secara Empiris

Selain dampak positif dan menjanjikan dari implementasi desentralisasi fiskal, ternyata beberapa tinjauan teoritis menunjukkan hal sebaliknya. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemajuan masyarakat, implementasi

desentralisasi fiskal ternyata mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, melalui engurusan sumber daya alam dan sumber potensi masyarakat. Schwartz, Guilkey, and Racelis (2002) menemukan pada awal desentralisasi fiskal menyebabkan pemerintah daerah pada awalnya mengalokasikan pengeluaran sektor kesehatan tinggi namun lambat laun alokasi ini makin menurun seiring dengan hilang atau kurangnya kontrol dari pusat. Makin tinggi implementasi desentralisasi fiskal memungkinkan adanya pendeteksian terjadinya penyimpangan dan hukuman (Carbonara 2000 dan Wildasin 1995);

Pengaruh Negatif Desentralisasi Fiskal Secara Teoritis

Secara teoritis, desentralisasi fiskal menyebabkan konflik kepentingan antar makin meningkat ; pembangunan lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan berskala lokal; terjadi dominasi pertimbangan politik; terjadi kesenjangan antar daerah dan antar masyarakat; terjadi pemborosan yang dapat mengarah ke korupsi, mendorong terjadinya penggelembungan anggaran (*Mark up*), terjadi Inefisiensi. Boadway and Shah (2009) menjelaskan dampak negative dari implemntasi fiskal yaitu adanya *improved countervailing institutions*. Desentralisasi fiskal ternyata memperlemah sistim monitoring, kontrol, dan audit dari pemerintah pusat. Kondisi ini akan menciptakan peluang korupsi di daerah (Ackerman 1978, Tanzi 1995, Prud'homme 1994). Hal ini didukung oleh penelitian Shleifer and Vishny (1993) bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan korupsi melalui banyaknya instansi yang harus dilewati untk mengurus perizinan sehingga menyebabkan jumlah investor menurun. Terkait dengan koordinasi, Breton dan Scott (1978) menemukan desentralisasi fiskal dapat menimbulkan masalah dalam hal koordinasi antar yuridiksi termasuk memunculkan biaya yang lebih mahal hingga dapat menyebabkan masalah stabilisasi makro. Menurut Prud'homme (1995) dan Tanzi (1995) desentralisasi fiskal dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi makro suatu negara akibat kemampuan kontrol pemerintah pusat ke daerah yang berkurang. Reinikka and Svensson (2004) serta Bardhan and Mookherjee (2000) menjelaskan desentralisasi fiskal akan mendorong terjadinya penyelewangan-penyelewengan akibat bermunculan raja raja kecil di daerah (*the capture by local elites*. Perilaku fiskal pemerintah daerah dalam merespon transfer dari pusat menjadi determinan penting dalam menunjang efektivitas kebijakan transfer (Aulia, 2013).

Hipotesis Lebih Lanjut tentang Desentralisasi Fiskal

Pro dan kontra dari dampak desentralisasi fiskal masih dapat diperdebatkan. Sehingga tujuan desentralisasi fiskal memunculkan 4 hipotesis baru yang harus dibuktikan lebih lanjut, yaitu *pertama*, apakah desentralisasi fiskal memungkinkan terjadinya efisiensi yang lebih baik dari alokasi sumber daya dan dengan demikian menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, *kedua*, apakah desentralisasi fiskal akan mengarah ke pelayanan publik yang lebih baik atau sebaliknya, *ketiga*, apakah desentralisasi fiskal akan membawa stabilitas ekonomi makro atau sebaliknya, *keempat*, apakah desentralisasi fiskal mampu mendorong birokrasi menjadi lebih efisien dan mengurangi korupsi atau sebaliknya membuat birokrasi lebih panjang dan mendorong maraknya korupsi.

Dampak Tingginya Ketergantungan Daerah pada Transfer Pusat

Transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Tujuan dari transfer ini sebenarnya untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Simanjuntak, 2002). Transfer pusat ini mendorong terjadinya inefisiensi. *Pertama*, ketergantungan daerah yang tinggi pada Transfer Pusat Tinggi. Bukti empiris menunjukkan akibat tingginya ketergantungan daerah pada dana transfer, Mello (2001) dan Naganathan (1999) menemukan karena terlalu tergantungnya daerah pada dana transfer pusat, daerah akhirnya kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal, akibatnya dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang besar lagi dari pusat. Sementara penerimaan pajak daerah makin menurun. Menurut Oates (1999), menyikapi hal tersebut seharusnya pemerintah daerah seharusnya lebih berupaya mengeksplorasi basis pajak lokal secara optimal dibandingkan mengandalkan transfer pusat yang mengakibatkan kecenderungan pemerintah dalam merespon transfer dari pusat semakin berkurang. *Kedua*, transfer pusat menyebabkan rendahnya *tax effort* atau upaya penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Akibatnya kontribusi kedua pos penerimaan daerah ini tidak signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kuncoro (2004) menemukan secara rata-rata di Indonesia PAD hanya mampu membiayai APBD pemerintah daerah sebesar 20 %. Menurut Kuncoro, kenyataan ini

menimbulkan perilaku asimetris pemerintah daerah. *Ketiga, munculnya fenomena fly paper effect*. Maimunah (2006) menyatakan bahwa *fly paper effect* adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD. Menurut Oates (1999) *fly paper effect* dapat terlihat ketika respons (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer. Sedangkan menurut Tresch (2002), *fly paper effect* merupakan respons yang asimetris dari pemerintah daerah terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (*grants*) yang cenderung meningkat (Aulia, 2013). Fenomena *fly paper effect* akan membawa implikasi lebih akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Trunbull, 1998). Fenomena *flypaper effect* pada alokasi pengeluaran, menyebabkan pemerintah daerah sangat menggandalkan penerimaannya dari pusat sehingga menghasilkan ilusi fiskal. Ilusi Fiskal yaitu ketika pemda dalam memenuhi kebutuhan publiknya cenderung lebih menunggu atau merespon lebih besar DAU bukan dari upaya penggalan atau optimalisasi pendapatan asli daerahnya (PAD). Kondisi ini menyebabkan peningkatan belanja daerahnya tidak sepadan dengan peningkatan PAD (Aulia, 2013). Holtz-Eakin et al (1985) dalam Syukriy & Halim (2003) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respons yang *non-linear* dan *asymmetric*. Menurut Sukriy & Halim (2003) daya prediksi DAU terhadap Belanja Daerah adalah kuat pada regresi dengan lag (DAU 2001 terhadap belanja daerah 2002) Widodo (2007) menjelaskan bahwa dengan menggandalkan transfer pusat ini daerah dalam proses penyusunan APBD nya cenderung menggunakan konsep *incrementalism* hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada *Item-item* anggarannya yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan. Pemerintah daerah hanya berusaha menambah atau

mengurangi jumlah rupiah pengeluaran dan PAD yang diterima agar dana transfer yang diterima konstan dengan tahun sebelumnya atau malah bertambah (Pratiwi, 2013). *Keempat*, membuka peluang korupsi. Korupsi adalah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau golongan. Menurut Martinez-Vazquez et al (2004) korupsi dapat berlangsung pada sisi pendapatan atau sisi pengeluaran negara atau juga bahkan di luar anggaran yaitu pada transaksi *quasi-fiskal* seperti pengenaan peraturan-peraturan. Beberapa ahli, menyatakan bahwa keuntungan dari kebijakan Desentralisasi Fiskal di negara berkembang biasanya terkikis oleh masalah yang terkait dengan birokrasi yang tidak *committed*; lemahnya kapasitas lokal dalam hal pengelolaan keuangan dan keterampilan; masih banyak para elit lokal yang mendominasi; lemahnya penegakan hukum, rendahnya partisipasi masyarakat dengan indikator ketidakterlibatan orang miskin dalam menetapkan agenda pemerintah. Untuk menginvestigasi dampak desentralisasi fiskal terhadap perilaku korupsi dijelaskan oleh Indikator korupsi diproksikan dengan variable data berupa jumlah penuntutan, kasus dan jumlah hukuman atas kasus korupsi, survey terhadap korban korupsi, data tentang persepsi masyarakat akan korupsi. Sementara ukuran desentralisasi diproksikan dengan data bagi hasil dari total pengeluaran pemerintah, sedangkan variabel Lain yang juga dipertimbangan adalah sewa ekonomi, kemungkinan tertangkap, faksionalisasi etnis. *Kelima*, tingginya angka kemiskinan makin meningkat ketika desentralisasi fiskal diimplementasikan. Makin banyak dana pusat yang ditransfer ke daerah makin tinggi tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Mussa Bawo (.....)

Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Dasar Hukum

- Tahun 2001 merupakan awal dimulainya desentralisasi fiskal di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan wujud adanya pelaksanaan isi pasal 18 (a) UUD 1945. yang dinyatakan...“ *Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sbg urusan pemerintah pusat*”. Efektifitas pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia berlaku sejak 1 Januari 2001

sesuai dengan UU NO 22 /1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 /1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Agar daerah lebih mandiri dalam mengatur segala bentuk penerimaan dan bijaksana dalam pengeluarannya, dikeluarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sumber Pendanaan Desentralisasi

Untuk menjalankan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan urusan yang dilimpahkan pusat, pusat memberikan sumber pendanaan desentralisasi ke daerah yang terdiri dari 3 jenis kewenangan yaitu (1) kewenangan pungutan, (2) transfer dana dari ABPN, (3) kewenangan pinjaman. Kewenangan pungutan dimaksudkan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal di daerah, yang diatur dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Transfer dana dari ABPN terdiri dari 4 jenis pendapatan yaitu *pertama*, Dana Bagi Hasil yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, utamanya bagi daerah yg menghasilkan sumber penerimaan negara yang signifikan, *kedua*, Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditujukan untuk menyesuaikan antara kapasitas fiskal daerah dengan beban pendanaan atas urusan yg telah diserahkan, *ketiga*, Dana Alokasi Khusus (DAK) dtujukan untuk menyelesaikan permasalahan pendanaan daerah yg tidak bisa digeneralisir & menyeimbangkan tingkat layanan publik, *keempat*, Dana Transfer Lain berupa kebijakan khusus yg tidak tertampung dalam Daper, namun berkembang dalam dinamika perkembangan otonomi. Selanjutnya *kewenangan pinjaman* diberikan pusat ke daerah dengan tujuan untuk akselerasi pembangunan, dalam hal sumber pendanaan yg diserahkan tidak mencukupi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dari beberapa jenis penerimaan daerah, DAU adalah dana yang paling dominan diandalkan oleh keuangan daerah. Dana yang terbesar yang bersumber dari Pendapatan APBN ini dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sebagai *equalization grant*, DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah. Pengalokasian

DAU didasarkan atas formula dengan konsep Alokasi Dasar dan Celah Fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. Peningkatan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai *equalization grant*) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal, melalui **pembatasan porsi** alokasi dasar dan **memperbaiki bobot** variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, serta **memperhatikan jumlah daerah yang mengalami penurunan DAU** dan total penurunannya relatif kecil. Penetapan besaran DAU yang bersifat final (tidak mengalami perubahan), dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang. Besaran pagu DAU Nasional ditetapkan minimum 26% dari Penerimaan Dalam Negeri Netto (PDN). Pada tahun 2015, pagu nasional yang disediakan untuk DAU sebesar 27,7% dari pendapatan dalam negeri netto atau sebesar Rp 352.887,85 milyar atau Rp 353 trilyun. Formulasi DAU adalah sbb:

$$DAU = AD + CF \text{ dan } CF = KbF - Kpf$$

DAU adalah Dana Alokasi Umum

AD adalah Alokasi dasar (memperhitungkan belanja gaji PNS)

CF adalah celah fiskal

KbF adalah Kebutuhan Fiskal Daerah terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB perkapita, IPM, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Kpf adalah Kapasitas Fiskal Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Arah kebijakan DAK tahun 2015 (BKF Kemenkeu 2015) (a) mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP, serta melakukan restrukturisasi bidang DAK sehingga lebih fokus dan berdampak signifikan; (b) membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik untuk mendorong pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat; (c) memprioritaskan daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah pesisir dan kepulauan sebagai kriteria khusus dalam

pengalokasian DAK;(d) melanjutkan kebijakan *affirmatif* DAK yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar untuk daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah. Adapun perhitungan DAK didasarkan atas 3 kriteria, yaitu:

Pertama, Kriteria Umum (KU): → Indeks Fiskal Netto (IFN)

- $KKD = \text{Kemampuan Keuangan Daerah}$
- $KKD = (PAD + DAU + DBH - DBH DR) - \text{Gaji PNSD}$
- $IFN = \frac{KKD_{\text{daerah}}}{\text{Rata-rata KKD Nasional}}$

Kedua, Kriteria Khusus (KK): → Indeks Karakteristik Wilayah (IKW)

- Otsus Papua dan Papua Barat.
- Karakteristik Daerah → Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan dengan negara lain, Daerah Pesisir dan/atau Kepulauan.
- $IKW = \frac{IKW_{\text{daerah}}}{\text{Rata-rata IKW Nasional}}$
- $IKW_{\text{daerah}} = \text{Indeks Tertinggal} + \text{Indeks Perbatasan} + \text{Indeks Kepulauan}$
- $\text{Indeks Tertinggal} = \frac{\text{Score Ketertinggalan}}{\text{Rata-rata Ketertinggalan}}$ (berlaku juga untuk Indeks Perbatasan dan Indeks Kepulauan)

Ketiga, Kriteria Teknis (KT): → Indeks Teknis (IT)

- Berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK.

Dana Transfer Lainnya.

Dana transfer lainnya terdiri dari 3 jenis yaitu (1) Tunjangan Guru PNS, (2) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (3) Dana Insentif Daerah (DID)

Beberapa Permasalahan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Seperti halnya negara lain, Indonesia juga mengalami beberapa kendala dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal ini sehingga efektifitas desentralisasi fiskal berkurang. Adapun kendala yang dimaksud antara lain.

Pertama, sebagian besar daerah terlambat dalam menyampaikan APBD nya sehingga mengganggu ketepatan waktu pengesahan dan pencairan anggaran.

Kedua, peranan PAD (kemandirian daerah) masih relatif rendah khususnya di

kabupaten/kota sehingga kurang menjamin efisiensi dan akuntabilitas penggunaan belanja. Rendahnya pengumpulan PAD ini karena daerah sudah terbiasa mengandalkan dana transfer dari pusat (ketergantungan pada dana pusat tinggi) dan peranan PAD yang masih relatif rendah disebabkan oleh basis pajak daerah khususnya kab/kota yang masih terbatas. *Ketiga*, alokasi terbesar masih untuk pos belanja gaji pegawai rata-rata 60% APBD, sementara Belanja Modal rata-rata kurang dari 10%. *Keempat*, penyerapan belanja relatif lambat sehingga tidak tercapai pencapaian target penyerapan anggaran. *Kelima*, SILPA yang tersimpan di bank-bank daerah relatif besar. Hingga periode Agustus 2015 tercatat Rp 271 triliun SILPA diseluruh propinsi dan kabupaten kota se Indonesia yang idle yang tidak dimanfaatkan. *Keenam*, tingkat akuntabilitas pemda dalam pengelolaan keuangan daerah relative belum merata. Berdasarkan data dari BKF (2015), secara nasional dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013, dari 456 daerah yang telah diaudit oleh BPK, 98 daerah mendapatkan opini WTP, 56 daerah mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan, 277 daerah mendapatkan opini WDP, 7 daerah mendapatkan opini Tidak Wajar dan 18 daerah mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat.

Kesimpulan

Desentralisasi fiskal telah memberikan peluang luas kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi daerahnya. Namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi daerah sehingga tujuan desentralisasi fiskal belum memperoleh hasil yang maksimal. Untuk itu, perlu ada evaluasi oleh pemerintah pusat secara menyeluruh atas implementasi kebijakan desentralisasi fiskal ini karena setelah hampir 15 tahun digulirkan jangan sampai dana transfer pusat yang sudah digulirkan begitu besar ke daerah, namun pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat masih rendah, angka kemiskinan, jumlah pengangguran, jumlah anak putus sekolah makin tinggi.

Daftar Pustaka

- Akai, N., and M. Sakata. 2002. *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data for the United States*. *Journal of Urban Economics* 52:93-108.
- Bayar Tumennasan. 2005. *Fiscal Decentralization and Corruption in the Public Sector. Economics Disertation*.
- Bird, M, Richard, 2000, *Fiscal Decentralization in Developing Countries*,
- Davoodi, H., and H. Zou. 1998. *Fiscal decentralization and economic growth: a cross-country study*. *Journal of Urban Economics* 43:244-257.
- Era Dable-Noris and Paul Wade . 2002. *The Chalenge of Fiscal Decentralization in Transition Countries and in Indonesia*. IMF
- Feld, L.P., H. Zimmermann, and T. Döring. 2004. *Federalism, Decentralization, and Economic Growth. Discussion Paper Series Fiscal federalism and national growth n° 1*, Philipps-University Marburg, Public Finance Group.
- Habibi, Nadir, Cindy Huang, Diego Miranda, Victoria Murillo, Gustav Ranis, Mainak Sarkar, and Frances Stewart. 2001. *Decentralization in Argentina. Yale University Economic Growth Center Discussion Paper 825*.
- Hayek, Friedrich. 1945. *The use of knowledge in society*. *American Economic Review* 35, no. 4: 519-530.
- Henderson, Vernon J and Ari Kuncoro. 2004. *Corruption in Indonesia. National Bureau of Economic Research Working Paper 10674*.
- Gorge Martinez-Vazquez. 2000 . *Impact of Fiscal Decentralization: Issues in Theory and Challenges in Practice*.
- Jing Jin and Heng Fo Zuo. 2002. *Fiscal Decentralization and Economic growth in China*
- Martínez-Vázquez, J., and R.M. McNab. *Fiscal Decentralization and Economic Growth*. *World Development* 31(9):1597-1616.
- Nicoletta Feruglio. 2007. *Fiscal Decentralization : An Overview*. UNDP.
- Oates, W.E. 1972. *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- . 1993. *Fiscal Decentralization and Economic Development*. *National Tax Journal* 46(3):237-243.

- Odd-Helge Fjeldstad. 2014. *Fiscal Decentralisation in Developing Countries Lessons for Bangladesh*. CMI Brief.
- Paul Smoke and Yun-Hwan Kim. 1998. *Intergovernmental Fiscal Transfers in Asia: Current Practice and Challenges for the Future*
- Prud'homme, R. 1995. *On the Dangers of Decentralization*. World Bank Economic Review 10:201-220.
- Prosiding Workshop Internasional. 2002. Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai pembangunan Daerah. FISIP Univ Parahyangan, Bandung.
- Paul Smoke and Blaned Lewis. 1996. *Fiscal Decentralization in Indonesia: A New Approach to an Old Idea*. World Development. Vol. 24, No. 8, pp. 1281-1299.
- Robin Boadway and Anwar Shah. 2000. *Inter Governmental Fiscal Transfer: Principles and Practice*.
- Reinikka, Ritva and Jacob Svensson. 2004. Using micro surveys to measure and explain corruption. *World Development* forthcoming.
- Rondinelli, Dennis. 1981. Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences* 47, no. 2: 133-145.
- Rose-Ackerman, Susan. 1997. The political economy of corruption.
- Stein, E., 1999. Fiscal Decentralization and Governemnt Size in Latin America. *Journal of Applied Economics*, Vol 2 No 2.

Daftar Isi

Persepsi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Kabupaten Mesuji (Studi Kasus Kecamatan Tanjungraya) Agung Wihandoko	277-300
Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perkembangan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000-2013 Tria Dessi Putri, Toto Gunarto	301-326
Menabung Dinar : Antisipasi Inflasi dan Depresiasi Ongkos Naik Haji Firmansyah	327-348
Desentralisasi Fiskal, Tinjauan Teoritis Dan Empiris Marselina	349-368
Analisa Determinan Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim Perkotaan <i>In Islamic Perspectives</i> Aas Nurasyiah	369-394
Analisis Kausalitas Granger Antara Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Dan Inflasi Di Provinsi Lampung Dedy Yulawan. Devi Evtasari.	395-408